

## LAPORAN NARASI

# Memperkuat Pengetahuan dan Peran Perempuan dalam Memberantas Korupsi



# LAPORAN NARASI

## MEMPERKUAT PENGETAHUAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

(STRENGTHENING WOMEN'S KNOWLEDGE AND ROLE  
IN COMBATING CORRUPTION)

Kerjasama

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi  
dengan  
United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)

Januari -Desember 2012

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi  
JL. Siaga I NO 2B, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan-Indonesia, 12510

## DAFTAR ISI

i. Pengantar .....	4
ii. Pengertian Istilah .....	6
BAB I. PENTINGNYA PEREMPUAN TERLIBAT DALAM.....	8
PERJUANGAN MELAWAN KORUPSI	
BAB II TENTANG PROGRAM :.....	18
MEMPERKUAT PENGETAHUAN	
& PERAN PEREMPUAN UNTUK MELAWAN KORUPSI	
BAB III : IMPLEMENTASI PROGRAM.....	16
BAB IV : REFLEKSI DAN REKOMENDASI .....	35

## PENGANTAR

Salam Keadilan dan demokrasi,

Korupsi merupakan persoalan serius di Indonesia, karena kejahatan ini telah meluas, sistematis, saling terkait satu aktor dengan aktor lainnya, baik mereka yang duduk di kekuasaan pengambilan keputusan, petugas layanan publik, dan pelaku usaha.

Korupsi menjadi rintangan utama dalam penanggulangan kemiskinan, pemenuhan Hak Asasi manusia dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Yaitu pemerintahan yang transparan, demokratis dan akuntabel.

Korupsi memiliki dimensi gender, yaitu adanya perbedaan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat tindak kejahatan korupsi. Perempuan lebih rentan menjadi korban dan mengalami rintangan menikmati Hak-Hak Asasi Perempuan dari tindakan korupsi, khususnya korupsi di sector layanan public.

Oleh Karenanya Korupsi menjadi salah satu tindak kejahatan yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia.

Gerakan perempuan, sebagai suatu gerakan transformatif yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, kejujuran, keberpihakkan terhadap kaum yang lemah dan tertindas serta bergerak untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik dan damai, perlu mengambil peran strategis dalam perjuangan melawan korupsi.

Keprihatinan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, akhirnya mendorong terbangunnya kerjasama dengan United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) untuk bersama-sama menguatkan masyarakat sipil, kelompok perempuan di tingkat basis yang terorganisir dan berpengetahuan untuk melakukan perlawanan terhadap segala tindak kejahatan korupsi, melalui program Memperkuat Pengetahuan dan Peran Perempuan dalam Memberantas Korupsi.

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan terimakasih, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, BAPPENAS, Biro Pusat Statistik, jaringan masyarakat sipil : Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparansi Internasional indonesia (TII), FITRA, REMDEC dan semua jejaring masyarakat sipil yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Terimakasih pula disampaikan kepada anggota dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di Kabupaten/kota Tarakan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Salatiga, Kendal, Demak, Semarang, Donggala, Sigi dan Toli-toli. Tidak lupa pula disampaikan terima kasih kepada pengurus Koalisi Perempuan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kerjasama yang baik selama pelaksanaan program sangat mendukung pencapaian target sesuai yang telah direncanakan.

Akhirnya, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan terima kasih kepada UNODC yang telah memberikan dukungan dan menjalin relasi kerjasama yang konstruktif dan saling mendukung. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Norwegia yang telah memberikan kepercayaan kepada UNODC untuk mengelola dukungan bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat sipil untuk melakukan serangkaian program dan kegiatan dalam melawan dan memberantas korupsi .

Jakarta, 30 Desember 2012

Dian Kartikasari

*Sekretaris Jenderal*

## PENGERTIAN ISTILAH

1. Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia : adalah struktur organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat desa/komunitas
2. Pengurus Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia : adalah Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di tungkat Propinsi
3. Pengurus Cabang Koalisi Perempuan Indonesia : adalah Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Kabupaten/kota
4. Sekretaris Jenderal : adalah pimpinan sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat nasional
5. Sekretaris Wilayah : adalah pimpinan sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Propinsi
6. Sekretaris Cabang : adalah pimpinan sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Kabupaten/kota
7. Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi kebijakan Publik: adalah struktur dalam sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia yang bertugas melakukan advokasi kebijakan untuk reformasi kebijakan publik.
8. ACE : Association For Community Empowerment
9. AMAN : Asosiasi Masyarakat Adat Nasional ((National Indigenous Association)
10. ASSPUK : Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (women's small Business Assistance Association)
11. Bappenas : National Development Planning Agency
12. BKKBN : National Population and Family Planning Board
13. BOK : Bantuan Operasional Kesehatan (Health Operational Assistance)
14. BOS : Bantuan Operasional Sekolah (School Operational Assistance)
15. DAD : Dana Alokasi Desa (Village Allocation Fund)
16. FITRA: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Indonesian Forum for Budget Transparency)
17. GOW : Gabungan Organisasi Wanita (women's Organization alliance)

18. HWK : Himpunan Wanita Katholik (Association of Catholic Women)
19. ICW : Indonesian Corruption Watch
20. INFID : International NGO Forum on Indonesian Development
21. JATAM : Jaringan Advokasi Tambang (Mining Advocacy Network)
22. KNPI : Komite Nasional Pemuda Indonesia (Indonesian Youth National Committee)
23. KOHATI : Korps HMI Wati (Women Groups of Muslim Student Association)
24. LBH APIK : Women Legal Aid Assosiation
25. MDG : Millennium Development Goal
26. PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Empowerment and Family Welfare)
27. Poskesdes : Pos Kesehatan Desa (village health post)
28. Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu (Integrated Service Post)
29. PPSW : Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (Women Resource Development Center)
30. Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat (Community Health Center)
31. RASKIN : Subsidized rice for the Poor
32. TOT : Training Of Trainer

# BAB I

## PENTINGNYA PEREMPUAN TERLIBAT DALAM PERJUANGAN MELAWAN KORUPSI

### 1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang terus berkembang. Praktek-praktek korupsi di Indonesia, dinilai sebagai tindak kejahatan yang sistemik dan endemic. Karena kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan bentuk kerja sama atau kejahatan terorganisir yang melibatkan politisi, birokrat dan pengusaha, dan terjadi di semua tingkatan pemerintahan

Korupsi merupakan ancaman bagi demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Korupsi juga merupakan tindak kejahatan yang berpotensi menghancurkan upaya mewujudkan keadilan sosial. Berbagai tindak korupsi berakibat langsung pada semakin memburuknya layanan publik.

Pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu tuntutan utama Gerakan masyarakat untuk reformasi pada tahun 1998.

Ditinjau dari kajian hukum, upaya pembentukan hukum untuk memberantas korupsi terus dilakukan, dari aspek hukum materiil maupun aspek formil, antara lain diterbitkannya : 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuatan berbagai undang-undang tersebut menunjukkan bahwa upaya penyempurnaan hukum untuk mengatasi tindak kejahatan korupsi terus dilakukan. Namun jumlah kasus korupsi terus meningkat dan meluas, dengan modus operandi, dan jumlah nominal kerugian yang semakin meningkat pula.

Korupsi memiliki dimensi gender, yaitu adanya perbedaan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat tindak kejahatan korupsi. Perempuan lebih rentan menjadi korban dan mengalami rintangan menikmati Hak-Hak Asasi Perempuan dari tindakan korupsi, khususnya korupsi di sector layanan public.

Upaya mencegah dan melawan korupsi tidak akan mengalami kemajuan secara signifikan jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, birokrat dan komisi Penanggulangan Korupsi.

Dibutuhkan suatu gerakan masyarakat yang kuat dan meluas, melibatkan semua kelompok untuk melawan dan menghentikan berbagai tindakan korupsi. Namun luasnya dan kompleksnya definisi korupsi serta banyaknya bentuk-bentuk korupsi menyebabkan perempuan, terutama perempuan ditingkat akar rumput, mengalami kesulitan untuk mendeteksi kejahatan korupsi. Kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tindak kejahatan korupsi ini, mengakibatkan perempuan seringkali menjadi korban dari tindak kejahatan korupsi. Bahkan, beberapa pakar anti korupsi menyatakan, bahwa perempuan, khususnya perempuan di tingkat akar rumput, relative lebih toleran (permisif) terhadap tindak kejahatan Korupsi, karena ketidaktauannya dan lemahnya posisi tawar mereka dihadapan pejabat publik dan petugas layanan sosial.

Disamping itu, Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman hidup, kepentingan dan daya juang yang berbeda. Perbedaan pengalaman, kepentingan dan daya juang ini akan berdampak pula pada perbedaan bersikap dan bertindak untuk melawan korupsi.

Berbagai pemberitaan di media, terutama televisi dan radio, yang dinikmati oleh perempuan di tingkat akar rumput, berkontribusi mengaburkan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Pemberitaan media yang mengangkat kasus-kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara mencapai ratusan juta, ratusan miliar hingga trilyunan, mengakibatkan masyarakat memandang bahwa kasus korupsi hanyalah kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara saja dan dengan jumlah nominal yang sangat besar.

Untuk itu dibutuhkan serangkaian program yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang korupsi serta meningkatkan ketrampilan advokasi untuk melawan korupsi.

## **2. Problem Statement**

1. Korupsi merupakan problem serius yang mengancam demokrasi dan tujuan mewujudkan keadilan sosial
2. Berbagai upaya pembangunan bidang hukum untuk mengatasi korupsi tidak efektif menurunkan tindak korupsi karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
3. Korupsi memiliki dimensi gender, yaitu mengakibatkan dampak negative yang berbeda pada perempuan dan laki-laki.
4. Korupsi, terutama di sektor layanan publik, menimbulkan kerugian langsung pada perempuan, menimbulkan pemiskinan dan merintangi pencapaian MDG's
5. Perempuan, karena peran, pengalaman hidup dan kepentingannya yang berbeda dengan laki-laki, memiliki pengalaman yang berbeda pula tentang korupsi. Jika ia memiliki pengetahuan tentang korupsi akan memberikan kontribusi berharga dalam mencegah dan melawan tindak korupsi.
6. Rendahnya akses informasi tentang korupsi bagi perempuan mengakibatkan perempuan kurang berperan dalam melawan korupsi .
7. Dibutuhkan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang korupsi dan pentingnya peran perempuan dalam melawan korupsi

## **3. Mandat Koalisi Perempuan Indonesia**

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki visi: Terwujudnya kesetaraan dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan korupsi.

Perhatian serius terhadap Persoalan Korupsi di Indonesia ini berdasarkan :

- 1. Mandat Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada 14-18 Desember 2009, menyatakan bahwa :**  
Kepengurusan Nasional Koalisi Perempuan Indonesia untuk Kedilan dan Demokrasi Periode 2009-2014, harus melakukan advokasi terhadap 15 isu-isu strategis yang diprediksi akan menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan masyarakat khususnya perempuan dan anak. salah satu isu strategis tersebut adalah Perempuan dan Pemiskinan. Mandate tersebut berbunyi sebagai berikut :

*Perempuan dan Pemiskinan, yaitu mendorong pemerintah untuk menghentikan berbagai kebijakan dan praktek-praktek yang mengakibatkan pemiskinan.*

*Koalisi Perempuan Indonesia harus mendorong pemerintah dan aktor pembangunan lainnya termasuk anggota koalisi Perempuan Indonesia untuk menghentikan berbagai aktifitas yang mengakibatkan pemiskinan, serta melakukan upaya sistematis untuk menghentikan proses pemiskinan, termasuk didalamnya upaya untuk menghentikan tindak kejahanan korupsi.*

*Hasil Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia, Desember 2009*

- 2. Bahwa Koalisi Perempuan melakukan advokasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan.** Peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi yang substantif, memastikan bahwa semua kebijakan publik dirumuskan berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kepentingan perempuan, serta untuk mengikis praktek-praktek korupsi.
3. Praktek-praktek korupsi menimbulkan akibat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan gender yang disandang oleh keduanya. Praktek-praktek korupsi tersebut menimbulkan rintangan bagi perempuan untuk menikmati Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Perempuan, dan menghambat upaya pencapaian tujuan Millenium Development Goal.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Koalisi Perempuan Indonesia merancang dan melaksanakan program : Memperkuat Pengetahuan dan Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi.

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menyampaikan terimakasih kepada United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) atas dukungannya, sehingga memungkinkan Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan program ini.

Koalisi Perempuan Indonesia berharap, proses, materi dan capaian-capaihan program Pemberantasan Korupsi ini dalam memberikan sumbangan untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil di tingkat local, nasional dan internasional dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

## **BAB II**

### **TENTANG PROGRAM :**

### **MEMPERKUAT PENGETAHUAN & PERAN PEREMPUAN UNTUK MELAWAN KORUPSI**

#### **I. Strategi Umum**

Upaya memperkuat Pengetahuan dan Peran Perempuan untuk Melawan Korupsi dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu :

- 1) Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan tentang pentingnya memberantas tidak kejahanan korupsi
- 2) Membangun Jejaring Kerja
- 3) Advokasi Kebijakan Publik
- 4) Monitoring dan evaluasi

Setiap strategi utama masing-masing memiliki elemen penting dan metode sebagai berikut:

##### **1) Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan**

Elemen penting pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan adalah kelompok perempuan yang terorganisir dan memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis untuk memberantas korupsi.

Untuk mewujudkan elemen penting tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) akan melakukan pendidikan komunitas dengan metode Outreach di komunitas perempuan yang telah diorganisir oleh Koalisi Perempuan dan membentuk organisasi di tingkat desa. Organisasi perempuan di tingkat desa ini merupakan bagian dari struktur Koalisi Perempuan yang disebut : Balai Perempuan.

Pendidikan outreach dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan persiapan,

- a. Pengembangan Modul
- b. Pembuatan alat peraga dan media informasi untuk pelatihan
- c. Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer-TOT) bagi Fasilitator

## **2) Membangun Jejaring Kerja**

Elemen penting membangun Jejaring kerja adalah :

- a. Kerja sama dengan jejaring masyarakat sipil yang saat ini telah ada.
- b. Menginisiasi terbentuknya jejaring kerja, khusus kelompok perempuan untuk advokasi korupsi

Kedua elemen penting tersebut akan dicapai dengan adanya pertemuan rutin untuk konsolidasi dan berbagi peran dengan kelompok masyarakat sipil pegiat gerakan melawan korupsi. Serta pertemuan dengan kelompok perempuan untuk mendorong terbentuknya jejaring baru untuk memperkuat gerakan memberantas korupsi yang telah ada.

Di tingkat nasional, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan akan melakukan pertemuan berkala dengan organisasi yang telah bekerja di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti : Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Remdec, Insist, IWGFF dll.

Di tingkat daerah, propinsi dan Kabupaten, Koalisi Perempuan Indonesia akan mendorong sekretariat dan anggota Koalisi Perempuan di tingkat propinsi, kabupaten dan desa untuk bekerja sama dengan jejaring masyarakat sipil anti korupsi dan membangun jejaring organisasi perempuan melawan korupsi.

## **3) Advokasi Kebijakan dan Penegakkan Hukum**

Elemen penting dalam advokasi kebijakan dan Penegakkan Hukum adalah

- a. Kampanye
- b. Lobby/dialog kebijakan
- c. Publikasi dan Dokumentasi

Dalam melakukan kampanye anti korupsi beberapa strategi akan diimplementasikan seperti : Kampanye di media massa (Radio, Televisi dan Koran cetak) serta kampanye dengan menggunakan media alternatif seperti : bekerja sama dengan radio komunitas. SMS gateway, penggunaan millis anggota dan Website Koalisi Perempuan, serta mengefektifkan berbagai bentuk jejaring sosial.

Lobby atau dialog kebijakan publik akan dilakukan di tingkat nasional dan atau nasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengusulkan revisi / perubahan hukum / peraturan dan atau mengusulkan undang-undang baru / peraturan yang akan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum pencegahan dan korupsi serta

mendorong dilakukannya proses penegakan hukum yang adil, transparan dan akuntabel terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

Publikasi dan dokumentasi akan diadakan untuk memperkaya pengetahuan dan informasi, terutama literatur tentang perempuan dan korupsi. Publikasi ini juga akan menginspirasi kelompok lain terutama perempuan, atau individu untuk memerangi korupsi.

#### **4) Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dilakukan dalam dua tingkatan yaitu monitoring dan evaluasi ditingkat manajemen program dan monitoring di tingkat implementasi di lapangan.

Monitoring dan evaluasi di tingkat managemen program dilakukan untuk melihat perencanaan terkait design program, jenis kegiatan, alokasi waktu dan jadwal kegiatan, melihat konsistensi dan korelasi antara design program dan kegiatan dengan Tujuan, capaian dan hasil yang direncanakan, melihat manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan.

Monitoring dan evaluasi di tingkat lapangan dimaksudkan untuk melihat kesenjangan (gap) antara perencanaan dan pelaksanaan dilapangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dilapangan, praktik-praktek terbaik yang dapat direplikasi di tempat lain, upaya mengatasi kesulitan dilapangan dan gap antara perencanaan dan implementasi serta pembelajaran dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

## **II. Goal, Objective, outcome mapping and Activities**

### **1. Goal :**

**Memperkuat Gerakan Masyarakat Sipil melawan korupsi melalui upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Kritis Kelompok Perempuan untuk melawan segala bentuk tindak kejahatan korupsi. Membangun Gerakan Zero Toleran terhadap segala bentuk tindak kejahatan korupsi**

### **2. Objective:**

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis kelompok perempuan tentang dampak negative korupsi terhadap upaya mewujudkan keadilan dan demokrasi.

- b. Meningkatkan ketrampilan dan memperkuat strategi kelompok perempuan dalam melakukan advokasi untuk memberantas korupsi melalui pengorganisasian dan berbagai bentuk pendidikan/pelatihan.
- c. Memperkuat gerakan masyarakat sipil melawan korupsi melalui konsolidasi dengan jejaring anti korupsi yang telah ada dan pembentukan jejaring baru
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi tentang gerakan perempuan melawan korupsi sebagai upaya untuk memperluas dukungan dari masyarakat dalam melawan korupsi, serta menyediakan literature tentang dimensi gender dalam korupsi.

### **3. Capaian yang direncanakan:**

- a. Menguatnya gerakan perempuan melawan korupsi di tiga propinsi (Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah)
- b. Adanya sinergi antar masyarakat sipil dalam melakukan gerakan masyarakat sipil
- c. Gerakan Perempuan melawan korupsi memberikan sumbangan pada perbaikan Pelayanan Publik dan percepatan pencapaian MDG
- d. Meluasnya diskursus dimensi gender dalam korupsi yang mendorong kelompok perempuan di tingkat internasional, nasional dan lokal untuk melawan korupsi.

### **4. Hasil yang direncanakan :**

- a. Tersedianya bahan –bahan dan sarana untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) yang mudah diakses dan dipahami oleh perempuan di tingkat akar rumput.
- b. Terdapat 80 orang fasilitator perempuan dari 27 provinsi yang mampu melakukan transfer pengetahuan tentang bahaya korupsi dan pentingnya gerakan perempuan melawan korupsi.
- c. Terdapat Kelompok Perempuan di 27 desa yang mampu melakukan upaya melawan berbagai bentuk tindak kejahatan korupsi
- d. Terdapat Kelompok Perempuan di 9 Kabupaten/kota di tiga propinsi yang berbeda yang melakukan gerakan melawan korupsi di tingkat kabupaten/kota

- e. Kelompok masyarakat sipil bekerja sama untuk melakukan pendidikan public dan menuntut penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan Korupsi

#### **5. Kegiatan –Kegiatan:**

##### **1. Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan**

- a. Pembuatan modul, bahan bacaan, media pelatihan
- b. Training Of Trainer
- c. Outreach pendidikan kelompok perempuan di tingkat desa
- d. Pertemuan rutin kelompok perempuan di tingkat desa untuk membahas masalah korupsi

##### **2. Membangun Jejaring Kerja**

- a. Pertemuan kelompok perempuan di tingkat desa dengan actor pembangunan lain di desa.
- b. Pertemuan masyarakat sipil di tingkat Kabupaten/kota
- c. Pertemuan masyarakat sipil di tingkat Propinsi
- d. Pertemuan Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan dengan Jejaring Anti Korupsi di tingkat nasional

##### **3. Advokasi Kebijakan dan Penegakkan Hukum**

###### **a. Kampanye**

- i. Pembuatan bahan-bahan kampanye populer
- ii. Kampanye di media massa melalui talk show, konferensi pers, press release
- iii. Kampanye melalui media alternatif

###### **b. Lobby dan dialog Kebijakan**

- i. Dialog dengan aparat dan tokoh kunci di desa
- ii. Dialog dengan legislative (DPRD)
- iii. Dialog dengan eksekutif (Pemerintah Daerah, Dinas, Biro)
- iv. Dialog dengan Aparat Penegak Hukum

###### **c. Publikasi dan Dokumentasi**

- i. Penulisan temuan kasus korupsi dan desiminasi ke media massa
- ii. Penulisan buku tentang Dimensi Gender dalam Korupsi dan Gerakan Perempuan Melawan Korupsi.

#### **4. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Monitoring Manajemen Program (Design Program, Kegiatan dan Keuangan)
- b. Monitoring lapangan

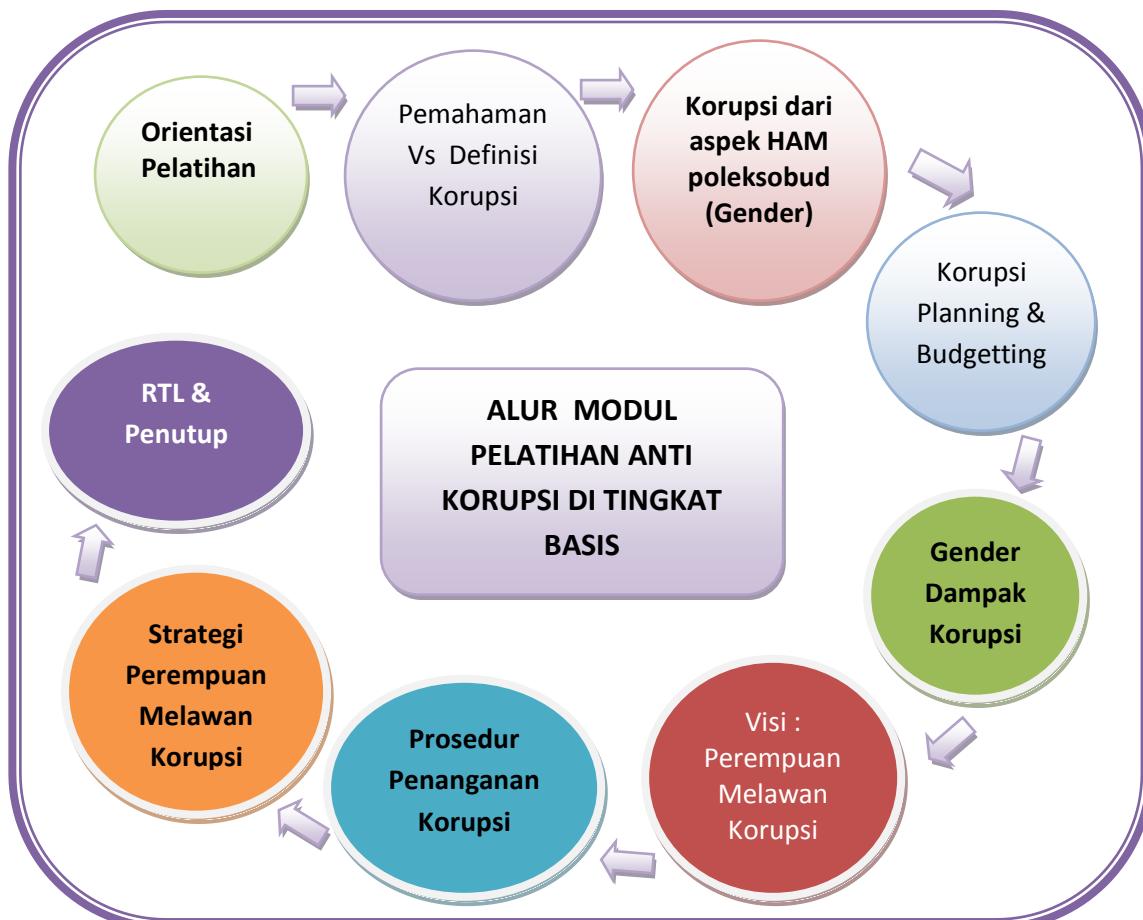
## BAB III

# IMPLEMENTASI PROGRAM

### 1. Pengorganisasian komunitas perempuan dan pendidikan

#### a. Pembuatan modul, bahan bacaan, media pelatihan

Penyusunan Modul diawali dengan pembuatan kurikulum pendidikan anti korupsi, sebagai acuan untuk menyusun materi dan metodologi yang akan diberikan di tingkat Desa (Balai Perempuan). Penyusunan Kurikulum dilakukan pada 19 Januari 2012 di Kantor Sekretariat Nasional. Kemudian dilakukan Expert Meeting untuk memberikan masukan terhadap alur pendidikan yang sudah disusun dalam Manual Untuk Fasilitator dan Modul Pendidikan Anti Korupsi. Expert meeting dilaksanakan pada 22-23 Februari 2012, di Wisma PGI Jl Teuku Umar, No 17 Menteng, Jakarta Pusat. Dihadiri 15 orang yang terdiri dari; tim pengelola program, tim kecil penyusun manual dan modul, pengurus nasional Koalisi Perempuan Indonesia, fasilitator dan beberapa narasumber. Kurikulum Modul Pendidikan Anti Korupsi setelah Expert meeting sebagai berikut:



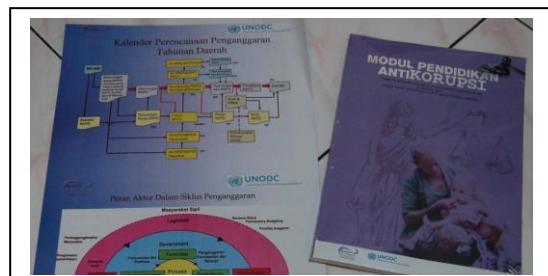
Setelah penyusunan Kurikulum, maka disusunlah Modul, yaitu untuk dua kepentingan , yaitu untuk penyelenggaraan Pendidikan bagi Pelatih (Training Of Trainer – TOT ) dan untuk Pendidikan di Tingkat basis.

Modul ini merupakan panduan bagi setiap fasilitator untuk menyelenggarakan pelatihan. Selain penyusunan Modul, juga dibuat Hand Out dan alat peraga pelatihan untuk mempermudah peserta pelatihan di tingkat basis dalam memahami tentang materi yang dibahas dalam pelatihan, yaitu :

- a. **Factsheet:** berisi tentang korupsi dan kompilasi kebijakan terkait dengan korupsi. Prosedur pengaduan kasus korupsi, dan institusi yang memiliki kewenangan memeriksa dan memproses secara hukum kasus korupsi
- b. **Flyers:** berisi tentang alur anggaran di desa, siklus, dan tahapan rentan korupsi; dan bagaimana mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat desa



Bapak Dedi ( KPK) dalam expert meeting



### HASIL KEGIATAN PEMBUATAN MODUL, BAHAN DAN MATERI PELATIHAN

- Tersedianya Modul Pendidikan Anti Korupsi & manual Untuk Fasilitator
- Tersedianya bahan –bahan dan sarana untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) yang mudah diakses dan dipahami oleh perempuan di tingkat akar rumput.

## b. Pelatihan Bagi Fasilitator Pendidikan Anti Korupsi (Training Of Trainer TOT)

Training Of Trainer diawali dengan recruitment dan seleksi calon fasilitator secara terbuka. Untuk mendapatkan fasilitator yang dapat memenuhi tujuan pendidikan anti korupsi secretariat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar antara lain;

- Tercatat sebagai Anggota Koalisi Perempuan Indonesia
- Berpengalaman menjadi fasilitator, minimal sebagai fasilitator di tingkat balai.
- Tidak terlibat atau mengalami kasus melakukan tindakan korupsi.
- Bersedia menindaklanjuti hasil-hasil pelatihan yang telah diberikan.

Sepanjang Bulan Januari sampai Maret, sekretariat nasional telah menerima 138 application letter dan Curriculum Vitae dari anggota yang berminat mengikuti Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi.

Seleksi calon fasilitator yang akan mengikuti ToT dilakukan pada tanggal **22 Maret 2012**, dilakukan oleh tim seleksi yaitu; Mike Verawati, Dian Kartikasari, dan Luki Paramitha selaku anggota Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Sesuai dengan target jumlah fasilitator, maka dalam seleksi ini juga telah terpilih 80 calon fasilitator yang akan diundang untuk mengikuti proses ToT.

ToT pendidikan anti korupsi dilaksanakan untuk mempersiapkan fasilitator yang akan melakukan pendidikan di basis, yaitu anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang ada di Balai Perempuan. Untuk dapat melakukan pembekalan kepada 80 calon fasilitator yang lulus seleksi proses TOT dilakukan di 3 kota berdasarkan region struktur wilayah/cabang Koalisi Perempuan Indonesia;

1. Region Barat (Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, dan DKI Jakarta)
2. Region Tengah (Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)
3. Region Timur (Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara)

**ToT di Region Barat**, dilaksanakan di Jakarta tanggal 16-20 April 2012, peserta yang mengikuti ada 27 orang (Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, dan DKI Jakarta) Fasilitator: **Ibu Abdi Suryaningati** dari YAPPIKA, Narasumber: **Bapak Sanri Yustiana** dari staff Direktorat Layanan dan Pendidikan Masyarakat KPK, dan **Bapak J. Danang Widoyoko** dari Indonesian Corruption Watch

**ToT di Region Tengah**, dilaksanakan di Surabaya tanggal 16-20 Mei 2012, peserta yang mengikuti berjumlah 27 orang (Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) Fasilitator: **Ibu Titiek Kartika Hendrastiti**. Narasumber; **Ibu Dr Enny Suastuti** dari Pusat studi Hukum di Universitas Trunojoyo Bangkalan, dan **Bapak Lutfi J Kurniawan**, dari Malang Corruption watch juga dosen hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**ToT di Region Timur**, dilaksanakan di Makassar tanggal 30 Mei – 2 Juni 2012, peserta yang mengikuti berjumlah 26 orang (Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara) Fasilitator: **Ibu Abdi Suryaningati dari YAPPIKA**. Narasumber: **Bapak Rofie Hariyanto**, staff Direktorat pendidikan dan Layanan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan **Bapak Asram Jaya** dari Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan (FIK ORNOP)



#### *Pelaksanaan TOT Pendidikan Anti Korupsi di Region Barat, Timur dan Tengah*

Dari pelatihan TOT Pendidikan Anti Korupsi, dapat diketahui bahwa:

- a. Isu korupsi bukan isu baru/asing bagi peserta, namun isu Gender dan Korupsi merupakan isu yang sangat baru bagi peserta.
- b. Umumnya peserta sudah mengenal kata korupsi, namun belum memiliki pemahaman secara utuh tentang korupsi dari aspek hukum, budaya dll..
- c. Beberapa peserta sudah berpengalaman mengadvokasi kasus korupsi, namun advokasi yang dilakukan masih belum terstruktur.
- d. Peserta TOT memiliki semangat yang kuat untuk melakukan pelatihan Anti Korupsi di kelompok perempuan tingkat basis, bahkan peserta TOT yang berasal dari daerah yang tidak terkena program pelatihan di basis (daerah Selain Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur) menyatakan akan membangun kerja sama dengan pihak lain (pemerintah, Orangisai masyarakat sipil maupun swasta) untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi

## **HASIL TRAINING OF TRAINER**

- 80 Fasilitator Perempuan memahami Definisi Tentang Korupsi Berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia, Aspek HAM, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dari Korupsi, Korelasi Korupsi dengan Perencanaan & Penganggaran Negara, dampak Korupsi terhadap perempuan dan laki-laki, keluarga, masyarakat dan negara. Serta Teknik penyelenggaraan Pelatihan dan Transfer pengetahuan tentang Korupsi
- 80 Fasilitator Siap melakukan sosialisasi tentang Isu Korupsi sebagai pelatihan maupun sebagai narasumber.
- 27 Fasilitator siap menjadi fasilitator dalam Outreach pendidikan Anti Korupsi di 27 desa yang menjadi Area Program

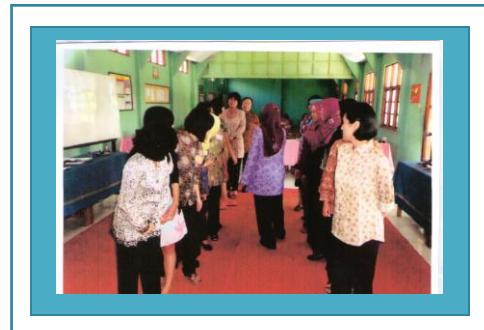
## **CAPAIAN TOT**

- Sejumlah 320 Komunitas atau sekitar 6400 laki-laki dan perempuan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk kejaharan korupsi dan perbedaan akibat tindak kejahatan Korupsi terhadap perempuan dan laki-laki dari sosialisasi tentang Isu Korupsi yang dilakukan oleh 80 fasilitator.
- Adanya perubahan sikap dan tindakan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia peserta TOT, menjadi lebih tertib dalam administrasi keuangan, transparan dan akuntabel
- Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia peserta TOT, menolak dukungan dana dari pemerintah, karena mengandung unsur korupsi, seperti misalnya dukungan pelaksanaan program Penghapusan Buta huruf di Maumere -Nusa Tenggara Timur, dimana Pemerintah Daerah meminta agar Koalisi Perempuan Indonesia mempertanggung jawabkan dana sebesar 100%, padahal hanya menerima 90% dari total dana.

### c. Outreach pendidikan kelompok perempuan di tingkat desa

Sebagai tindak lanjut dari ToT Pendidikan Anti Korupsi, fasilitator yang telah dilatih akan menerapkan kurikulum dan metode pendidikan anti korupsi di komunitas masing-masing yang dinamakan kegiatan outreach untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Balai Perempuan dilaksanakan di 3 propinsi (Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur).

- ❖ Pelatihan Anti Korupsi di Jawa Tengah di laksanakan di Kota Salatiga, di Balai Perempuan Balai Perempuan di Kelurahan Mangunsari dan di Kelurahan Sidorejo Kidul. Pelatihan di Kabupaten Kendal, dilaksanakan di Balai Perempuan Di Desa Sukumulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Patebon, dan Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegadon. Sedangkan pelatihan di Kabupaten Demak, dilaksanakan di Balai Perempuan di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Di Desa Kunir, Kecamatan Dempet. Masing-masing di tiap desa atau kelurahan diikuti oleh 30 orang, sehingga di tujuh (7) Desa/kelurahan, terdapat 210 orang. Dengan komposisi kepesertaan, sekitar 91% peserta perempuan dan 9 % peserta laki-laki, menjadi peserta dan menerima manfaat pelatihan.
- ❖ Pelatihan Anti Korupsi di Sulawesi Tengah dilaksanakan di Kota Palu, masing-masing di Balai Perempuan di Kelurahan Lambara, Kecamatan Palu Utara, Petobo/Vatutela dan Kelurahan PandanJese, Kecamatan Palu Barat. Sedangkan di Kabupaten Donggala dilaksanakan di Desa Alindau, Desa Sipeso dan Desa Sikara di Kecamatan Sindue Tobata . Pelatihan di Toli-Toli, dilaksanakan di Balai Perempuan di Desa Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Desa Tinigi Kecamatan Galang dan Desa Janja Kecamatan Lampasio. Masing-masing pelatihan di ikuti oleh 30 orang, sehingga di sepuluh desa tersebut, sebanyak 300 orang menjadi penerima manfaat pelatihan Anti korupsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 12% peserta laki-laki dan 88% peserta perempuan.
- ❖ Pelatihan di Kalimantan Timur di laksanakan di Tarakan, dilaksanakan di Balai Perempuan Persemaian, Pantai Amal, dan Lapangan. Samarinda, dilaksanakan di Balai Perempuan Gunung Cermin, Pampang dan Palar. Kutai Kertanegara, dilaksanakan di Balai Perempuan Beloro, Muara Kaman, dan Loa Ulung. Masing-masing diikuti oleh 30-35 orang, sehingga di sepuluh desa



terdapat 320 perempuan sebagai penerima manfaat pelatihan Anti Korupsi, dengan komposisi kepesertaan sekitar 90% perempuan dan 10% laki-laki.

- ❖ Sosialisasi tentang Isu Korupsi dan pentingnya Perempuan Terlibat dalam Gerakan Melawan Korupsi, sosialisasi ini dilakukan di 320 komunitas oleh peserta pelatihan TOT Pendidikan Anti Korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan forum-forum pertemuan masyarakat, seperti rapat pertemuan warga dan forum pertmuhan khusus perempuan seperti arisan, pengajian dan pertemuan rutin di Balai Perempuan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari kegiatan diluar perencanaan yang telah disusun sejak awal. Kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari pelaksanaan TOT yang dilaksanakan di tiga Kota: Jakarta, Makasar dan Surabaya.



Pelatihan di tingkat desa ini diselenggarakan selama dua hari berturut untuk membahas tentang pengertian Korupsi, melihat tindakan korupsi dari sudut pandang hukum, kemasyarakatan, agama, Hak Asasi Manusia dan tata kelola pemerintahan demokratis dan apa akibat dari tindak Korupsi. Selain itu, dalam pelatihan ini, peserta memetakan siapa saja aktor pelaku korupsi, di mana dan bagaimana korupsi dilakukan. Sehingga peserta dapat mengidentifikasi kasus-kasus Korupsi yang terjadi di sekitarnya. Kasus-kasus Korupsi yang telah diidentifikasi dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berkala untuk dicari jalan keluar penyelesaiannya oleh kelompok perempuan bersama jejaring kerja.

Pelatihan dan sosialisasi Anti Korupsi di tingkat desa ini, juga memberi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan penilaian dan pendapatnya terhadap proses dan hasil pembangunan di desa mereka masing-masing. Lebih dari itu, pelatihan ini mengajak peserta pelatihan melakukan refleksi, apakah sepanjang perjalanan hidup mereka pernah secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan korupsi, dalam bentuk apa, untuk alasan apa dan apa akibatnya. Selanjutnya, dengan menyadari akibat dari korupsi, peserta tergerak untuk membangun gerakan perempuan melawan Korupsi, dengan visi baru gerakan perempuan anti korupsi : **Indonesia tanpa Korupsi**.

Seluruh proses pelatihan dan diskusi rutin di tingkat desa, seperti : Pertemuan Rutin Balai Perempuan, arisan dan pengajian, diikuti dengan sangat antusias

oleh Peserta Pelatihan. Antusiasme perempuan ini disebabkan, bagi mereka, pendidikan Anti Korupsi ini untuk pertama kalinya mereka ikuti, dan belum pernah ada pendidikan serupa yang diselenggarakan di desa mereka. Melalui pendidikan Anti Korupsi di tingkat desa ini, peserta berharap dapat mengetahui tentang APA ITU KORUPSI dan bagaimana MENCEGAH DAN MENGHENTIKANNYA, baik di tingkat rumah tangga, di masyarakat maupun di lingkungan publik lainnya, terutama terkait dengan penggunaan kewenangan pejabat dan petugas layanan sosial.

#### HASIL KEGIATAN

- ❖ Tergalinya pemahaman dasar perempuan dan sumber-sumber pengetahuan perempuan tentang korupsi.
- ❖ Sejumlah 830 perempuan di tingkat basis memperoleh pengetahuan tentang korupsi, mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran
- ❖ Sejulah 27 Fasilitator peserta TOT, memperoleh pengalaman langsung dalam fasilitasi pendidikan anti korupsi di tingkat basis
- ❖ Teridentifikasinya persepsi masyarakat (perempuan) tentang korupsi
- ❖ Teridentifikasinya kasus-kasus korupsi berdasarkan pengalaman perempuan
- ❖ Adanya rencana aksi untuk mengatasi praktek-praktek korupsi.

#### CAPAIAN

- ❖ Peserta Pelatihan mulai mempertanyakan jumlah dan alokasi Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa dan atau kepada Badan Perwakilan Desa (BPD)
- ❖ Peserta Pelatihan mempertanyakan beberapa masalah yang diindikasikan ada unsur koropsi, seperti misalnya:
  - Realisasi pembangunan /penghalusan jalan yang tidak kunjung dilaksanakan, padahal dananya telah ada.
  - Alokasi dana untuk Program Makanan Tambahan (PMT) bagi Bayi dan Balita yang jumlahnya sangat kecil
  - Penjualan Sumber mata air oleh kepala Desa
  - Pengurangan jumlah pembagian Beras untuk kaum miskin
  - Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  - Pemotongan dana Bantuan Langsung untuk masyarakat
  - Pemotongan dana untuk Posyandu
- ❖ Peserta Pelatihan mulai menuntut adanya transparansi dan dipenuhinya hak atas informasi Kepala Desa, BPD, Kepla Sekolah
- ❖ Masyarakat ikut bergabung dengan peserta pelatihan untuk memperjuangkan hak
- ❖ Kepala Desa dan BPD mulai menyadari bahwa kaum perempuan didesanya mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas
- ❖ Sejumlah Kepala Desa, BPD dan Kepala Sekolah senang dengan peningkatan kesadaran kritis perempuan, namun beberapa Kepala Desa marah, karena merasa dimonitor /dikontrol oleh ibu-ibu.

## **2. Membangun Jejaring Kerja**

### **a. Serial Meeting di Tingkat Kabupaten/kota**

Pertemuan rutin kelompok perempuan di tingkat desa untuk membahas masalah korupsi. Pertemuan rutin ini diselenggarakan di tingkat Kabupaten dengan peserta: perwakilan peserta pelatihan di tingkt desa, organisasi masyarakat sipil dan akademia . Agenda dalam pertemuan rutin adalah, berbagi pengalaman tentang proses outreach pelatihan anti korupsi, membahas temuan-temuan kasus yang dialami atau diketahui oleh peserta pelatihan, sharing rencana aksi hasil pelatihan dan penajaman strategi untuk melaksanakan Rencana Aksi, serta membangun sistem dukungan bagi gerakan melawan korupsi di tingkat basis.

#### **d.1. Di Tiga Propinsi (Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi tengah)**

##### **a. Jawa Tengah**

Pelaksanaan serial meeting di tingkat wilayah dilakukan di wilayah Jawa Tengah, pada Bulan September 2012 dengan mengundang 25 orang yang terdiri dari perwakilan dari peserta outreach, Badan Perwakilan Desa, lembaga-lembaga dan LSM perempuan yang selama ini intens berjejaring dengan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah (PKBI, LRC KJHAM, LBH Apik, EFFORT, dan Yasanti) juga beberapa relasi akademisi dari Pusat Studi Gender Universitas Diponegoro, dan Universitas Soegijapranata.

##### **b. Sulawesi Tengah**

Pelaksanaan serial meeting di tingkat wilayah dilakukan di wilayah Sulawesi Tengah pada bulan Oktober 2012 dengan mengundang 30 orang yang terdiri dari perwakilan peserta outreach, pemuda, pelajar dan mahasiswa.

##### **c. Kalimantan Timur**

Pelaksanaan serial meeting di tingkat Cabang Kalimantan Timur (Tarakan, Samarinda, Kutai Kartanegara), pada bulan Oktober 2012 dengan mengundang 30 orang yang terdiri dari perwakilan peserta outreach, lembaga-lembaga dan LSM perempuan yang selama ini intens berjejaring dengan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kalimantan Timur (KOHATI HMI, Lembaga kajian hukum perempuan, KOHATI cabang Tarakan, JATAM Samarinda, LBH APIK Samarinda, AMAN Kaltim, Fatayat Kukar, HWK Kec. Tenggarong, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten, Forum Peduli Gender) juga beberapa relasi dari Mahasiswa, KNPI, Kader PKK, Kader Posyandu, Ketua RT.

## d.2. Di Tingkat Nasional

Serial Meeting untuk membangun jaringan di tingkat nasional dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 2012, karena merupakan pertemuan pertama yang ditujukan untuk membentuk sebuah jaringan perempuan anti korupsi di tingkat nasional, serial meeting ini mengundang kawan-kawan narasumber; Bapak Danang Widoyoko dari ICW, dan Bapak Dedi A Rachim, direktur pendidikan dan layanan masyarakat dan Ibu Monica Tanuhandaru dari UNODC. Pertemuan ini difasilitasi oleh Bapak Handoko Sotomo dari REMDEC. Peserta serial meeting berjumlah 29 orang yang berasal dari staf Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia rekan-rekan NGO (INFID, PPSW, ASSPUK, PKM ACE, FITRA, ICW, dan PGI) dalam serial meeting ini telah disepakati bersama bahwa penting sekali menemukan dan menyepakati konsep dan argumentasi perlawan korupsi yang akan menjadi konsentrasi jaringan perempuan; juga melakukan pemetaan isu dan baik bersifat makro dan mikro, apa yang akan didorong oleh kawan-kawan di nasional dan apa yang menjadi konsentrasi advokasi kawan-kawan di daerah. Serial meeting selanjutnya akan dilaksanakan

pada Bulan Desember, dengan terlebih dahulu diadakan pertemuan tim kecil yang akan menyusun draft konsep dan argumentasi anti korupsi.



Serial meeting yang kedua Dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2012, Peserta serial meeting berjumlah 15 orang (FITRA, IPPI, YPHA, Mahasiswa UI, Anggota KPI DKI Jakarta) ditujukan untuk; Konsep bersama yang akan dipakai dalam advokasi anti korupsi, pemetaan isu-isu yang akan disinergikan dalam gerakan anti korupsi dan strategi advokasi gerakan anti korupsi.

### HASIL KEGIATAN

- ❖ Adanya pembahasan yang lebih mendalam tentang kasus-kasus yang telah dibahas dalam pendidikan outreach
- ❖ Adanya Penajaman strategi mengatasi praktik korupsi (dari strategi yang telah dirumuskan dalam pendidikan outreach)
- ❖ Terbukanya ruang komunikasi antara perempuan di basis dengan organisasi jaringan dan terbangunnya jejaring kerja perempuan untuk Melawan Korupsi
- ❖ LSM/Organisasi jaringan dan akademisi mengetahui bahwa Koalisi Perempuan Indonesia memiliki kepedulian terhadap isu korupsi

.....lanjutan Hasil kegiatan

- ❖ Adanya komitmen dari LSM/Organisasi jaringan dan akademia untuk mendukung gerakan anti korupsi yang dibangun oleh perempuan di tingkat basis.
- ❖ Terbentuknya jaringan kerja organisasi perempuan untuk melawan korupsi
- ❖ Adanya pemahaman bersama terkait dengan isu Korupsi
- ❖ Adanya kesepakatan tentang agenda bersama yang akan dilakukan oleh jaringan perempuan melawan korupsi di tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional
- ❖ Adanya kesepakatan tentang mekanisme berkoordinasi
- ❖ Adanya kesepakatan rumusan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, sebagai anggota jaringan.

## CAPAIAN KEGIATAN

- ✓ Gagasan Untuk Membangun GERAKAN PEREMPUAN MELAWAN KORUPSI dari perempuan di tingkat basis mulai menguat.
- ✓ Perempuan di tingkat basis, khususnya peserta pelatihan Anti Korupsi, semakin percaya diri untuk melaksanakan Rencana Aksi untuk mencegah dan menghentikan praktik korupsi, karena adanya dukungan dari organisasi jaringan dan akademia
- ✓ Organisasi Masyarakat sipil dan akademisi menyadari tumbuhnya embrio gerakan perempuan melawan korupsi dari basis
- ✓ Terbentuknya Jaringan Perempuan untuk advokasi Isu Korupsi di tingkat Kabupaten dan Nasional

### 3. Advokasi Kebijakan dan Penegakkan Hukum

#### a. Pembuatan alat-alat Kampanye

Selain Modul Pendidikan Anti Korupsi, untuk dapat terus melakukan upaya-upaya pencegahan anti korupsi Koalisi Perempuan Indonesia juga menerbitkan beberapa alat kampanye yang bertujuan untuk mendukung advokasi pencegahan dan pengurangan dampak korupsi. Selama Bulan Desember Setnas KPI telah mencetak;

1. Leaflet tentang alur penganggaran di tingkat desa sebanyak 1000 eks
2. Poster Perempuan Melawan Korupsi sebanyak 1000 eks
3. Modul Pendidikan Anti Korupsi sebanyak 500 eks
4. Buku Pengalaman Perempuan Melawan Korupsi 150 eks
5. Buletine SEMAI Edisi Perempuan Melawan Korupsi sebanyak 2000 eks
6. Buku Agenda sebanyak 250 eks



#### b. Dialog Publik

##### 1). Dialog Publik di tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan dialog publik ini merupakan bagian dari sosialisasi proses pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk mengajak mitra-mitra lainnya seperti organisasi diluar organisasi perempuan, pemerintah, dan akademisi untuk membahas strategi advokasi pencegahan korupsi di tingkat kabupaten/kota. Dialog Publik ini dilaksanakan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga,



Kota Tarakan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Oktober dan November 2012

## 2). Dialog Publik di tingkat Propinsi

Selain pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota dialog publik dilaksanakan juga di tingkat propinsi, pada bulan Oktober 2012 di Semarang, Jawa Tengah. Dialog Publik ini dikuti oleh 100 peserta dengan narasumber dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, peserta pendidikan anti korupsi, akademisi dan media.

Dialog publik tingkat propinsi lainnya dilaksanakan di kota Palu propinsi Sulawesi Tengah pada bulan November 2012, dengan mengundang beberapa organisasi masyarakat, sektor pemerintah dan akademisi.

## c. Talk Show Radio & Konferensi Pers

### a) Talk show radio di Jawa Tengah

Dilaksanakan pada 16 Oktober 2012, bekerjasama dengan Radio Gaya 98,5 FM. Penyelenggara adalah Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia, Wilayah Jawa Tengah, membahas tentang : **"Menelaah Revisi UU KPK dan eksesnya terhadap perempuan dalam Pemberantasan Korupsi di Jawa Tengah"**. Selain itu Talkshow ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan advokasi anti korupsi yang telah dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah. Narasumber dalam Talkshow ini adalah Ir Mila Karmila , Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia- Jawa Tengah.

Ibu Mila SEKWIL Jawa Tengah dalam talkshow di salah satu radio di Semarang.



### b) Talk Show Radio di tingkat Nasional

dilakukan melalui kerjasama dengan (Kantor Berita Radio) KBR 68 H sebanyak 2 kali kegiatan. Talkshow I diselenggarakan pada 10 Desember 2012 dengan tema Posisi Perempuan dalam

wacana Anti Korupsi: Meretas Maskulinitas isu Anti Korupsi di Indonesia dengan Narasumber Dian Kartikasari, Koalisi Perempuan Indonesia dan Alien, Indonesia Corruption

Wacth (ICW). Pembahasan Talk Show ini membedah dimensi gender dalam korupsi, terkait dengan peran perempuan dalam melawan korupsi dan dampak Korupsi terhadap perempuan.

Talk show ke-2, diselenggarakan pada 11 Desember 2012 dengan tema Memperingati Hari Anti Korupsi dengan Narasumber Mike Verawati Tangka

Konferensi pers dilaksanakan oleh pengurus Koalisi Perempuan di Tingkat Kabupaten/kota. Di Tarakan dilaksanakan Konferensi Pers dengan thema "Pendidikan Anti Korupsi" pada 21 November 2012, dengan Narasumber Yahya, Ahmad Zein SH, MH (akademisi FH-UBT –Tarakan), Dra Hj Maryam, Msi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Tarakan, Nur Asikin Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia. dilaksanakan sesaat setelah penyelenggaraan dialog publik di Tingkat Propinsi. Konferensi Pers ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan hasil Dialog Publik serta rangkaian kegiatan pendidikan tingkat basis dan advokasi di tingkat desa dan kabupaten yang telah diselenggaraan di propinsi tersebut, serta menyoroti beberapa kasus korupsi yang perlu menjadi perhatian serius, yaitu korupsi dalam pelaksanaan Program Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

#### d. Dialog Kebijakan

Dialog Kebijakan dilakukan sejak tingkat Desa, kabupaten Kota, propinsi dan Nasional.

Dialog Kebijakan di tingkat Desa dilakukan dengan Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Kepala Sekolah dan Ketua Posyandu. Dialog Kebijakan di tingkat desa ini dilakukan di 27 Desa, yang merupakan area program untuk pendidikan Outreach, dengan Tujuan untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Disamping itu, kelompok perempuan juga membahas mekanisme untuk memperoleh informasi dan mekanisme menyampaikan keluhan terkait dengan buruknya pelaksanaan program perlindungan sosial, terutama program bantuan bagi kelompok miskin, seperti Beras untuk Kaum Miskin (Raskin), Program Makanan Tambahan (PMT) untuk perbaikan Gizi bayi dan Balita, serta bantuan langsung bagi kelompok masyarakat.

Sedangkan dialog kebijakan di tingkat Kabupaten/kota terutama dilakukan dengan Dinas Kesehatan, Bupati/Walikota, Badan Koordinasi Kelurga Berencana (BKKBN) dan Bappeda. Dialog kebijakan ini dilaksanakan di Demak dan Kendal, Jawa Tengah, Kutai Kartanegara, Tarakan dan Samarinda Kalimantan Timur, bertujuan untuk membahas kasus-kasus Korupsi yang terjadi di

beberapa desa, seperti : Pemotongan Dana Utuk Posyandu, Penjualan Sumber Mata Air oleh Kepala Desa, Penjualan Pil KB yang seharusnya Gratis dan penjelasan tentang Perencanaan Pembangunan serta mekanisme realisasi pembangunan.

Dialog Kebijakan di tingkat Nasional dilaksanakan pada :

- Bulan April dan Juni Membahas Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi yang diselenggarakan oleh Bappenas
- Tanggal 2 Oktober 2012, dalam Focus Group Discussuon yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas desain dan strategi pelaksanaan pendidikan anti korupsi berbasis Keluarga.
- Tanggal 16 Oktober 2012, Koalisi Perempuan Indonesia Berpartisipasi dalam Pertemuan Governing Board UNODC Projects Support Indonesia's Fight against Corruption & Strengthening the Capacity of Anticorruption Institutions in Indonesia, BAPPENAS, membahas rencana kegiatan dan dukungan untuk pemberantasan korupsi.

## HASIL KEGIATAN

- Tersedianya alat-alat kampanye melalui penyediaan materi /bahan informasi
- Terlaksananya dialog kebijakan di tingkat desa sebanyak 50 kali (dari 27 Desa yang menjadi area program rata-rata setiap desa melakukan 2 kali dialog kebijakan)
- Adanya pertemuan antara kepala Desa dengan Kelompok perempuan , membahasa keluhan masyarakat terhadap pembagian Raskin yang seharusnya dibagikan sebanyak 15 kg, tetapi hanya dibagikan 5 Kg per keluarga, tanpa ada penjelasan kepada warga (kasus di Sulawesi dan Maluku)
- Terlaksananya dialog Kebijakan di tingkat Kabupten/kota dengan Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKBN
- Terlibatnya Koalisi Perempuan Indonesia dalam Pembahasan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Tingkat Nasional
- Terselenggaranya Talkshow Radio sebanyak 3 kali ( 1 kali di jawa Tengah dan 2 kali di jakarta)

## CAPAIAN KEGIATAN

- Terbangunnya diskursus publik tentang : dimensi gender dalam Korupsi
- Berkembangnya opini publik tentang pentingnya Gerakan Terlibat dalam Gerakan pemberantasan korupsi
- Berkembangnya Kritik Kelompok Perempuan terhadap penanganan Kasus Korupsi yang:
  - lebih kental muatan politik daripada Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemiskinan
  - Cenderung memprioritaskan penanganan kasus daripada upaya pencegahan secara masif dan sistematis
- Adanya Respon Ketua KPK, yang diliput secara luas oleh media, yang berisi :
  - KPK berjanji akan memperkuat dimensi HAM dan Kesejahteraan dalam penanganan kasus korupsi
  - Menerima dengan baik ide tentang pentingnya pendidikan anti korupsi berbasis keluarga dan sejak usia dini dan akan segera menindak lanjuti usulah tersebut
- Diselenggarakannya Focus Group Discussion di KPK membahas tentang Realisasi Gerakkan Pendidikan Anti Korupsi berbasis keluarga
- Adanya formulasi strategi Kampanye isu Korupsi berbasis pengalaman perempuan.

## 4. Monitoring dan Evaluasi

**Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui 3 jalur, yaitu :**

a) Monitoring jarak jauh dilakukan melalui komunikasi via telepon, email dan Group Black Barry Messenger (BBM Group) untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, masalah yang ditemui dalam implementasi program dan mendiskusikan strategi baru untuk menghadapi masalah

b) Monitoring Lapangan

Monitoring lapangan dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah pada 26 November 2012, dengan menghadirkan Fasilitator: Nehik Sri Hidayati. Peserta Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah Penerima manfaat pelatihan, pelaksana kegiatan, koordinator dan pelaksana program di sekretariat nasional dan pihak pengamat. Monitoring dan evaluasi mencakup:

- a. Manfaat pelatihan Anti Korupsi bagi perempuan, manfaat di tingkat individu, keluarga, organisasi dan masyarakat.
- b. Perubahan di tingkat Individu, kelompok Perempuan dan masyarakat setelah dilaksanakannya pendidikan anti korupsi
- c. kendala selama melaksanakan program, kisah sukses yang membanggakan dalam pelaksanaan program dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pelatihan, bila program akan diselenggarakan lagi pada tahun yang akan datang.

#### **YANG MEMBANGGAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM**

- Berhasil membentuk Jaringan Perempuan Anti Korupsi dan menyelenggarakan Forum Perempuan Anti Korupsi
- Dialog Kebijakan dengan Pemerintah Provinsi, ada respon yang positif dan proses dialog yang komunikatif
- Kerjasama dengan BKBH Unisbang
- Exposure Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos)
- Mendorong transparansi kebijakan dan alokasi anggaran layanan publik
- Advokasi indikasi Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil : Kasus pungutan liar dalam pengurusan KTP dan akte kelahiran .
- Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik

#### **c) Monitoring dan Evaluasi secara Nasional**

Monitoring dan Evaluasi Nasional diselenggarakan pada Desember 2012 menghadirkan seluruh pengurus wilayah, cabang, perwakilan penerima manfaat dari Balai perempuan dan Tim Pelaksana di Sekretariat Nasional. Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat bersama capaian pelaksanaan program, kendala selama pelaksanaan program dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang baik dari aspek teknis maupun substansi



## **BAB IV**

### **REFLEKSI & REKOMENDASI**

#### **I. REFLEKSI**

- 1 Isu Gender dan Korupsi adalah isu yang relative baru dalam gerakan perempuan di Indonesia.
- 2 Demikian juga dengan Koalisi Perempuan Indonesia, menyelenggarakan pendidikan dan pengorganisasian serta advokasi berbasis pengalaman dan kepentingan perempuan dalam berhadapan dengan tindak kejadian korupsi, merupakan pengalaman pertama, sejak berdirinya organisasi ini (tahun 1998)
- 3 Karena Isu Gender dan Korupsi merupakan isu baru untuk diadvokasi, maka koalisi Perempuan Indonesia harus bekerja sejak tahapan paling awal dalam strategi advokasi, yaitu untuk :
  - a. Merumuskan Teori dan Konsep tentang Gender dan Korupsi
  - b. Membangun Argumen yang paling masuk akal dan mudah diterima oleh perempuan di tingkat basis : Mengapa Perempuan Harus Aktif melawan Korupsi, (dikaitkan dengan Visi Koalisi Perempuan Indonesia untuk **mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab**)
  - c. Untuk mendorong agar semakin banyak organisasi perempuan yang terlibat dalam gerakan melawan Korupsi. Koalisi Perempuan Indonesia beserta Jaringan Perempuan Anti Korupsi Membangun argumen pentingnya Gerakkan Perempuan berperan aktif dalam melawan segala bentuk praktik korupsi, dengan menghubungkan *ekses korupsi* terhadap tujuan gerakkan perempuan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan Gender serta demokrasi, dengan menggunakan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia.
  - d. Membangun strategi dan mempersiapkan materi untuk meningkatkan pengetahuan tentang Gender dan Korupsi dan mendorong terciptanya gerakan perempuan melawan Korupsi

- e. Membangun strategi untuk menghubungkan antara gerakan perempuan melawan korupsi dengan gerakan masyarakat sipil lainnya yang sudah sejak lama melakukan advokasi isu korupsi
- f. Melakukan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi kelompok perempuan di tingkat basis untuk membangun gerakan perempuan melawan korupsi
- g. Menghitung risiko yang mungkin timbul dan menyediakan strategi alternative untuk mencegah timbulnya dampak negative.

4 Dari proses Pendidikan Anti Korupsi, di tingkat basis dapat diketahui bahwa:

- a. Peserta Pelatihan di tingkat basis menyatakan bahwa pelatihan tentang Gender dan Korupsi, merupakan pengalaman pertama.
- b. Isu korupsi bukan isu baru/asing bagi peserta, namun isu Gender dan Korupsi merupakan isu yang sangat baru bagi peserta.
- c. Umumnya peserta sudah mengenal kata korupsi, namun belum memiliki pemahaman secara utuh tentang korupsi dari aspek hukum, budaya dll.
- d. Definisi tentang Korupsi dari aspek Hukum yang sangat banyak dan beragam, mengakibatkan peserta merasa bingung dan sulit mengingat, sehingga sesi pemahaman definisi tentang korupsi membutuhkan waktu lebih lama dari alokasi waktu yang telah ditentukan dalam modul.
- e. Rendahnya kecakapan berbahasa Indonesia dan tingginya jumlah peserta yang buta huruf, menuntut kreatifitas fasilitator untuk menggunakan bahasa lokal dan alat peraga serta gambar untuk menjamin diterimanya materi pelatihan oleh peserta.
- f. Beberapa peserta sudah berpengalaman mengadvokasi kasus korupsi, namun advokasi yang dilakukan masih belum terstruktur

5 Peserta TOT memiliki semangat yang kuat untuk melakukan pelatihan Anti Korupsi di kelompok perempuan tingkat basis, bahkan peserta TOT yang berasal dari daerah yang tidak terkena program pelatihan di basis (daerah Selain Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur) menyatakan akan membangun kerja sama dengan pihak lain (pemerintah, Organisasi

masyarakat sipil maupun swasta) untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi

- 6 Koalisi Perempuan Indonesia sudah berhasil membuka jalur untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun peran KPK terhadap tindak kejahatan korupsi hanya terbatas pada korupsi yang menyangkut uang diatas 1 milyard dan melibatkan pejabat negara. sementara korupsi di Desa adalah korupsi terhadap dana kecil (*Petty Corruption*) yang merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.
- 7 Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat nasional maupun struktur di bawahnya belum berhasil menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Padahal Kepolisian memiliki mandat untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan serangkaian tindakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
- 8 Temuan kasus-kasus korupsi dan yang diadvokasi oleh perempuan di tingkat Basis **tidak** dilaporkan ke Kepolisian, meskipun dalam pelatihan telah disampaikan materi tata cara pengaduan kasus korupsi kepada kepolisian. Perempuan enggan melaporkan ke kepolisian karena :
  - a. Penanganan kasus tindak kejahatan oleh polisi seringkali prosesnya berjalan lama dan pelapor harus berulang kali datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sehingga pelapor harus kehilangan waktu dan uang untuk menjalani proses penegakkan hukum tersebut.
  - b. Harus memiliki alat bukti yang lengkap. Jika pelapor tidak memiliki alat bukti lengkap, maka pihak terlapor dapat menuntut balik dengan tuntutan pencemaran nama baik.
  - c. Pelapor tidak memperoleh jaminan perlindungan yang memadai
- 9 Dari uraian pada butir no 8 tersebut diketahui, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya perempuan kepada kepolisian, masih sangat rendah.
- 10 Pentingnya menjalin kerja advokasi efektif dengan media untuk mendukung upaya penberantasan dan pencegahan korupsi, mengingat selama ini porsi pemberitaan korupsi di media massa cenderung memberitakan proses hukum dari kasus-kasus korupsi yang mengemuka di publik. Tetapi pemberitaan tentang dampak yang ditimbulkan oleh korupsi jarang diangkat sebagai bagian dari pendidikan publik.

11 Program Pengorganisasian, pendidikan dan advokasi melawan korupsi ini hanya dilakukan di 2 propinsi , 9 kabupaten kota (masing-masing popinsi 3 kabupaten/kota) di 27 Desa. Padahal Indonesia terdiri dari 33 Propinsi, 540 kabupaten/kota dan 68.000 Desa dan 12.000 kelurahan (sekitar 70.000 kelurahan dan desa). Jika dibandingkan cakupan area program dan keluasan Indonesia, maka program yang dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia belum mampu menjadi suatu gerakan yang masif dan terstruktur. Namun dari pelaksanaan program ini, Koalisi Perempuan Indonesia telah berhasil menanam embrio gerakan.

## II. REKOMENDASI

1. Pentingnya pengembangan dan perluasan pendidikan anti korupsi, terutama penguatan kapasitas dalam melakukan advokasi melawan korupsi yang berangkat dari persoalan riil komunitas.
2. Menguatkan komunitas untuk menemukan persoalan-persoalan korupsi yang berasal dari lingkup hidup mereka, sehingga gerakan anti korupsi semakin menguat di akar rumput.
3. Pengembangan materi dalam Modul Pendidikan Anti Korupsi terutama dalam metodologi praktis memahami tindak pidana korupsi, pola pengaduan, dan penguatan jaringan anti korupsi di tingkat basis
4. Pembuatan kurikulum dan panduan praktis anti korupsi yang dapat diimplementasikan ke dalam sistem pendidikan kader di partai politik, sebagai bagian untuk mendukung gerakan keterwakilan perempuan di parlemen.
5. Pentingnya UNODC memfasilitasi proses untuk saling belajar antara gerakan perempuan di Indonesia dengan gerakan perempuan Indonesia di negara lain untuk memperkuas pengetahuan dan jejaring kerja.
6. Memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan pemilih, sehingga masyarakat juga menggunakan indikator anti korupsi sebagai kriteria politisi yang akan mencalonkan diri dalam PEMILU 2014
7. Pengembangan kajian gender dan upaya pemberantasan, pencegahan, dan penegakan hukum kasus korupsi untuk mendukung advokasi anti korupsi

8. Pengembangan jaringan advokasi anti korupsi yang tidak hanya melibatkan komunitas dan organisasi perempuan, tetapi organisasi masyarakat sipil lainnya dan media.